

**PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT  
PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU)**

Imron Rusadi Lubis

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh *tax amnesty*, terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Propinsi Riau UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian sebanyak 47.196 orang. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Propinsi Riau UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian sebanyak 100 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan insidental sampling, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS 18.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

**Keywords:** *tax amnesty, kepatuhan wajib pajak dan pajak kendaraan bermotor*

---

**PENDAHULUAN**

Untuk masyarakat Rokan Hulu sendiri dikarenakan kebanyakan penduduknya masih bekerja sebagai petani, jadi mobilitasnya hanya pada kisaran area perkebunan dan pemukiman jarang sekali yang aktifitasnya kepusat kota. Karena alasan tersebut melalui pengamatan penulis bahwasanya hal tersebut menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayar PKB-nya dan wajib pajak menganggap merasa tidak perlu, pembayaran PKB hanya jadi beban. Namun, perspektif ini hanya dari kaca pengamatan penulis saja. Jadi, perlu penelitian ilmiah untuk mendukung perspektif ini agar nantinya diketahui sejauhmana pengaruh kebijakan perpajakan terhadap ketertarikan, minat, pandangan masyarakat khususnya Rokan Hulu yang berada diwilayah UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang ada, maka penulis

mencoba menyusun skripsi tentang pada pajak kendaraan bermotor dikarenakan cakupannya tidak terlalu luasdan agar lebih spesifik pembahasannya. Peneliti tidak akan hanya meneliti keterkaitan antara program *tax amnesty* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan program *tax amnesty* akan cepat diketahui dengan melihat seberapa banayak wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tanpa melihat apakah pemenuhan kewajiban tersebut adalah suatu kepatuhan siwajib pajak atau hanya tertarik pada program itu saja. Jadi, penelitian ini akan menitik beratkan dari sisi minat wajib pajak dalam membayar keajiban pajak Kendaraannya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Rujukan ditunjukkan dengan menuliskan nama keluarga/nama belakang penulis dan tahun terbitan, tanpa nomor

halaman. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Sebagai contoh: Wartini & Harjiyanti (2014) menyatakan bahwa etika kerja dibutuhkan untuk mengatur kehidupan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Baskoro (2014) menyatakan bahwa kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat (1) pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016, pasal 1 ayat (1) Pengampunan Pajak yang dimaksud adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan tidak dikenainya sanksi perpajakan (sanksi administrasi dan sanksi pidana) dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 Undang-undang tahun 2009 No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sedangkan definisi Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2014 kepatuhan memiliki arti bahwa adanya suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk dan menjalankan suatu ajaran atau peraturan yang ada.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mandagi dkk.(2014) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Sedangkan menurut Muliari dan Setiawan (2011) dalam Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Selain itu, menurut Mustofa dkk (2016) kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan.

Menurut Rahayu (2009), kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak (peribadi, badan) memenuhi semua kewajiban perpajakannya, serta melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan.

## METODE

Dalam penelitian ini sendiri, teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling insidental (accidental sampling). Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2012:122), (Sugiyono, 2016: 60),.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang taat maupun yang ikut dalam program tax amnesty baik pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu yakni dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam menentukan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus persamaan Slovin dengan rujukan (Principles and Methods of Research), selain itu karena jumlah populasi (N) diketahui dengan pasti, maka untuk menentukan ukuran sampel (n) sebagai berikut.

Adapun dalam penelitian ini jenis datanya yakni data kuantitatif dengan mementingkan variabel-variabel sebagai objek penelitian yang nantinya variabel-variabel tersebut akan didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing.

Untuk melihat pengaruh antara variabel satu dengan lainnya. Maka, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data secara kuesioner. Reabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus peneliti penuhi dalam menggunakan teknik pengumpulan data secara kuisisioner.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (2) Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas.

Berisi desain penelitian yang digunakan (metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengukuran variabel) yang ditulis dalam bentuk paragraf mengalir (tidak dibuat numbering).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda yaitu:  $Y = a + bX$ .  $Y = 29,702 + 0,031X$

Pada hasil analisis di atas, baris constant pada tabel adalah nilai konstanta dari persamaan regresi, nilainya adalah 29,702. Sedangkan pada baris total x pada tabel, nilainya adalah 0,31. Maka oleh karena itu dapat ditulis bentuk persamaan bergandanya adalah :  $Y = 29,702 + 0,031X$

Nilai konsanta ini menunjuk bahwa konstanta sebesar 29,702 berarti nilai konsisten variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 27,702.

Koefisien regresi X sebesar 0,031 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai tax amnesty, maka nilai kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar 0,031. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dinyakan arah pengaruh variabel tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif.

Berdasarkan data dan hasil dari responden menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak PKB membayar pajak pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan berdasarkan hasil dari regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa  $Y = 29,702 + 0,031X$ , yang berarti bahwa variabel X pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap variabel Y dan maka secara parsial pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil dari korelasi dapat dijelaskan nilai korelasi (0,026), maka hasil dari korelasi tersebut menunjukkan bahwa dapat pengaruh positif terhadap pengampunan

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan karena nilai korelasi yang rendah yaitu kurang dari 0,05.

Dengan  $t_{hitung} (0,253) < t_{tabel} (1,967)$ , yang mana apabila  $t_{hitung} < t_{tabel} (\alpha)$  pada uji hipotesis menunjukkan arti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Walaupun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suyanto dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan  $t_{hitung}$  sebesar 3,244 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,6829. Meskipun dalam penelitian ini variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial. Hal itu bisa dikarenakan ada faktor variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat (Untoro,2010) karena akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (*pay to ability*), faktor pendidikan wajib pajak yang tidak sesuai, sosialisasi perpajakan, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengupas, membahas, dan mengorek lebih dalam lagi faktor lain tersebut yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Pasir Pengaraian.

Kemudian, jika dilihat bahwa rata-rata wajib pajak membayar pajak tiap tahunnya sebesar >40.000 kendaraan tiap tahunnya dan jika dibandingkan dengan bayaknya kendaraan menunggak rata-rata sebanyak 2182 kendaraan kena denda sebanyak 8378 kendaraan dan juga apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang mendaftarkan kendaraannya tiap tahunnya maka kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak walaupun kepatuhan wajib pajak masih tergolong

cukup baik jika dilihat dari efektifitas penerimaan pajaknya.

Namun, apabila dilihat dari tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan diberlakukannya pengampunan pajak sesuai dengan UU No.11 tahun 2016 salah satunya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan, maka program pengampunan pajak dinyatakan berhasil

## SIMPULAN DAN SARAN

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kebijakan *tax amnesty* pajak berdasarkan UU No.11, 2016 tentang Penghapusan pengampunan Pajak di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan jika dilihat berdasarkan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan hasil uji  $t$ , nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,967. Dengan demikian  $t_{hitung} (0,253) > t_{tabel} (1,967)$ , maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, dan dari hasil koefisien determinasi (0,01) dapat dijelaskan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, kemudian ada atau tidaknya program perpajakan oleh pemerintah tingkat pemebayaran pajak masih tergolong tinggi dari tahun ketahun.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek yang serupa, yaitu pengaruh *tax amnesty*, sanksi administrasi, pemutihan, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian lebih teruji keandalannya. Di samping itu, diharapkan

untuk menguji variabel lain yang diduga kuat dapat mempengaruhi penerimaan pajak seperti pemahaman perpajakan, tarif pajak dan ketepatan pengalokasian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan dan Sukarta.(2016). Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 17; 2036-2060.
- Haniz, Nadya Fazriana. 2013. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tegal.Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasnuri, Zulfah Dwi. 2014. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kab/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2013).Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.Yogyakarta.
- Husnurrosyidah. (2016). Pengaruh Tax amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di BMT Se-Karisidenan Pati. Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 4; 211-226.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2007.Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta
- Iswandi, Riwisa. 2014. Analisis Pajak Kendaraan bermotor Provinsi Riau UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Kesuma, Agus Iwan. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak.Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen. Volume 12; 270-280.
- Kristiyawan, Dionisius Toni. 2014. Analisis Pengaruh Tunggakan pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan asli Daerah (Studi Kasus pada Up3ad Samsat Surakarta).Fakultas Ekonomi UNS. Surakarta.
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Off Set. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2013. PerpajakanEdisi Revisi. Edisi Ketiga Belas. AndiOff Set, Yogyakarta
- Puspareni, Purnamawati dan Wahyuni. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 7.
- Ragimun, 2014. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) di Indonesia.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat.Jakarta
- Rosidi,M. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi Jumlah Tinggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkar I Pekanbaru Selatan.Jurusan akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.Pekanbaru.
- Setyaningsih dan Okfitasari. (2016). Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty: Studi Kasus di Solo. Jurnal Ekonomi dan Keuangan.Volume 20; 415-433.

- Siradjah, Jafar Nurdin. 2014. Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat Wilayah Maros. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014 . SPSS Untuk Penelitian . Pustaka Baru . Yogyakarta
- Suyanto, Intansari dan Endahjati.(2016). Tax Amnesty.Jurnal Akuntansi. Volume 4; 9-22.Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis.